

ABSTRAK

Pokok pembahasan mengenai eksistensi kekuatan putusan komisi pengawas persaingan usaha Republik Indonesia terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999, dengan permasalahan implikasi putusan KPPU yang dimohonkan pembatalan, pembuktian langsung/*direct evidence* dan pembuktian tidak langsung/*indirect evidence*. Metode yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan bahwa putusan KPPU tidak dapat dieksekusi kecuali dengan penetapan pengadilan sebagaimana pasal 224 HIR. Terhadap putusan KPPU tersebut dapat dimohonkan pembahasan, namun tidak memberikan penjelasan putusan KPPU yang bagaimana dapat dimohonkan pembatalan. Merujuk pada ketentuan pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pembuktian langsung/*direct evidence* dan pembuktian tidak langsung/*indirect evidence* dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha dapat dijelaskan bahwa pembuktian untuk menentukan bersalah atau tidak pelaku usaha didasarkan atas ketentuan bahwa pelaku usaha dianggap telah terbukti melakukan persaingan usaha jika ditemukan beberapa petunjuk atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya.

Kata Kunci: Putusan, KPPU dan pembuktian

ABSTRACT

The subject of the existence of the regulatory commission ruling powers of the Republic of Indonesia competition against businesses that violate the Law 5, 1999, with the implication problem petitioned the Commission decision of cancellation, direct proof / evidence of direct and indirect evidence / indirect evidence. The method used is the approach of legislation and case-based approach, obtained a conclusion that the Commission's decision can not be executed unless the court warrant, as Article 224 HIR. Against the decision of the Commission can be applied for discussion, but it does not provide an explanation of how the Commission's decision can be applied for cancellation. Referring to the provisions of article 70 of the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, that the parties to the arbitration award may apply for cancellation if the decision is thought to contain the following elements of a letter or document filed in the examination, after the verdict, recognized or declared false false; after the decision taken those documents which are decisive, which is hidden by the other party; or a decision is taken on the results ruse conducted by one of the parties in the dispute. Direct proof / evidence of direct and indirect evidence / indirect evidence in competition proceedings can be explained that the evidence to determine guilt or innocence businesses predicated on businesses deemed to have been proven to have competition if found some hints or indirect evidence (indirect evidence) corresponding to some other events.

Keywords: Decision, the Commission and verification

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan perlindungannya, penyusunan tesis yang berjudul “EKSISTENSI KEKUATAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TERBUKTI MELANGGAR UU NO. 5 TAHUN 1999" dapat selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkat dari petunjukNya sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ketua Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Prof. Dr. Budi Kagramanto, S.H., M.H.,MM selaku Dosen Pembimbing tesis.
5. Para Dosen Penguji Tesis.
6. Staf Administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Kedua orang tua saya almarhum M. Soejoto dan almarhumah Soesilowati yang telah mengukir jiwa dan raga serta bimbingan semenjak lahir hingga dewasa.
8. Istri tercinta Kunti Wuryani, S.Hut., atas dukungannya.

9. Guru-guru rohani Syeh K.H., Achmad Shohibul Wafa Tajul Arifin dan KH. Moch. Ali Hanafiah Akbar.
 10. Saudara-saudara antara lain Heroe Tjahjono, Desi Tjahjani, Agung Subagjono, Novajanti Indah Prihatini, Budi Sudajanto dan Elvy Endah Widjajanti, serta anak-anak keponakan Sri Yuni Ekayanti, Yoga Marthadinata, Zandy Firnansyah, Zaki Ahmad, Zahir Ahmad dan Zidan Ahmad, terima kasih atas dukungannya.
 11. Rekan-rekan tergabung dalam Heru Sumanto & Partners.
 12. Rekan-rekan yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini.
- Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Surabaya, Februari 2015

Penulis,